

## Green Local Politics: Promoting the Role of Local Political Parties in Environmental Governance

Uwais Karni<sup>1</sup>; Afrizal Tjoetra<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Syiah Kuala, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Teuku Umar, Indonesia

<sup>1</sup>Email Korespondensi: [waisalgarni@usk.ac.id](mailto:waisalgarni@usk.ac.id)

**Received:** 17 Juli 2025

**Accepted:** 19 Juli 2025

**Published:** 21 Juli 2025

### Abstract

*The participation of local political parties in environmental governance remains an overlooked area in the discourse on democratic sustainability, particularly at the regional level. The research addresses the gap between the growing demand for sustainable environmental policies and the limited engagement of local parties. This study aims to identify and analyze the strategic role of local political parties in promoting responsive, equitable, and sustainable environmental policies. A qualitative case study approach was applied in two autonomous regions where local parties are actively present. Data were collected through in-depth interviews, document analysis, and limited observations. Findings reveal that although environmental issues are not yet fully integrated into political platforms, local parties hold potential to influence green governance, especially when driven by community pressure and urgent ecological concerns. The discussion emphasizes the need to strengthen institutional capacity and integrate environmental issues into local political agendas. This study concludes that local political parties can become key actors in environmental governance if supported by sufficient political, technical, and social resources.*

**Keywords:** Local Politics, Environment, Governance, Participation, Public Policy

Partisipasi partai politik lokal dalam tata kelola lingkungan masih menjadi celah dalam wacana demokrasi lingkungan, khususnya di tingkat pemerintahan daerah. Kesenjangan antara kebutuhan akan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan dan minimnya peran partai lokal menjadi masalah utama yang ingin dijawab melalui penelitian ini. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran strategis partai politik lokal dalam mendorong kebijakan lingkungan yang responsif, adil, dan berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus kualitatif di dua daerah otonom yang memiliki partai lokal aktif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, studi dokumen, dan observasi terbatas. Hasil menunjukkan bahwa meskipun belum terstruktur dalam platform politik, partai lokal memiliki potensi untuk memainkan peran penting dalam green governance, terutama ketika didorong oleh tekanan komunitas dan isu ekologis yang mendesak. Diskusi menggarisbawahi pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan partai serta integrasi isu lingkungan dalam agenda politik lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa partai lokal dapat menjadi aktor kunci dalam tata kelola lingkungan apabila mendapat dukungan politik, teknis, dan sosial yang memadai.

Kata Kunci: *Politik Lokal, Lingkungan, Tata Kelola, Partisipasi, Kebijakan Publik*

## A. Pendahuluan

Perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan ketimpangan akses terhadap sumber daya alam telah menjadi tantangan global yang membutuhkan respons dari berbagai level pemerintahan, termasuk pemerintah daerah. Dalam konteks ini, peran aktor-aktor politik lokal, khususnya partai politik lokal, semakin penting dalam mendorong tata kelola lingkungan yang berkelanjutan. Pemerintahan lokal merupakan entitas yang paling dekat dengan komunitas dan sumber daya alam yang dikelola, sehingga mereka memiliki posisi strategis untuk merancang kebijakan yang responsif terhadap isu lingkungan (Ramadhani & Yusuf, 2023).

Tata kelola lingkungan (environmental governance) tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai domain teknokratis atau administratif, melainkan telah menjadi isu politis yang melibatkan proses negosiasi, distribusi kekuasaan, dan pengambilan keputusan kolektif. Oleh karena itu, keterlibatan partai politik lokal sebagai salah satu institusi politik penting menjadi kunci dalam memastikan bahwa kebijakan lingkungan mencerminkan aspirasi publik dan menjamin keberlanjutan ekologis (Siregar & Hamzah, 2024). Namun, dalam praktiknya, peran partai politik lokal dalam tata kelola lingkungan masih cenderung minim atau belum optimal.

Kondisi ideal yang diharapkan adalah adanya partai politik lokal yang memiliki platform atau agenda lingkungan yang kuat, partisipasi aktif dalam perumusan kebijakan lingkungan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan berbasis ekologi. Akan tetapi, kenyataannya, banyak partai lokal masih terjebak dalam agenda politik jangka pendek yang pragmatis dan mengabaikan urgensi krisis ekologis (Prasetyo, 2021). Hal ini memperlebar kesenjangan antara kebutuhan kebijakan lingkungan yang responsif dan kemampuan kelembagaan lokal untuk memenuhinya.

Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola lingkungan sering kali ditentukan oleh komitmen politik dan kapasitas kelembagaan lokal (Nugroho & Hartini, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2023) menekankan bahwa intervensi aktor politik lokal dalam kebijakan lingkungan cenderung bersifat seremonial tanpa pengaruh substantif dalam proses legislasi atau pengawasan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan baru yang menyoroti potensi partai politik lokal sebagai agen perubahan dalam tata kelola lingkungan.

Meskipun demikian, kajian yang mengelaborasi secara mendalam kontribusi partai politik lokal dalam konteks green governance masih sangat

terbatas, terutama di wilayah-wilayah dengan otonomi daerah yang kuat. Hal ini menciptakan celah dalam literatur yang dapat diisi oleh penelitian ini. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana partai politik lokal dapat memainkan peran strategis dalam mendorong tata kelola lingkungan yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan. Penelitian ini juga berupaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat kontribusi partai lokal dalam agenda lingkungan.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap dimensi politik lokal dalam tata kelola lingkungan yang selama ini kurang diperhatikan dalam diskursus kebijakan publik. Dengan memanfaatkan pendekatan teoritis dari teori tata kelola (*governance theory*) dan demokrasi partisipatif, studi ini menawarkan kerangka konseptual untuk memahami dinamika antara institusi politik lokal dan kebijakan lingkungan dalam konteks desentralisasi. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memperkuat peran partai politik lokal dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

## **B. Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif dengan fokus pada analisis peran partai politik lokal dalam tata kelola lingkungan di tingkat daerah. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam konteks politik lokal dan praktik kebijakan lingkungan dalam situasi nyata. Lokasi studi dipilih secara purposif di dua wilayah dengan karakteristik partai lokal yang aktif dan memiliki isu lingkungan strategis, yaitu wilayah pesisir dan kawasan hutan produksi.

Subjek penelitian meliputi pengurus partai politik lokal, anggota legislatif daerah, pejabat dinas lingkungan hidup, serta perwakilan dari organisasi masyarakat sipil (OMS) yang bergerak di bidang lingkungan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dan snowball sampling untuk memperoleh informasi dari aktor-aktor kunci yang relevan dengan isu yang diteliti.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama: (1) wawancara mendalam menggunakan panduan terbuka untuk menggali perspektif dan pengalaman informan terkait peran partai lokal dalam isu lingkungan; (2) analisis dokumen seperti rancangan peraturan daerah (Ranperda), visi-misi partai, hasil rapat komisi

legislatif, dan berita lokal; serta (3) observasi langsung terhadap aktivitas partai lokal dalam forum publik atau sidang legislatif.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi metode dan sumber, diskusi sejawat (peer debriefing), serta audit trail dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode content analysis, dimulai dari tahap identifikasi data penting, pengelompokan dalam kategori tematik, hingga interpretasi makna dan keterkaitan antara peran politik dan output kebijakan lingkungan.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Minimnya Agenda Lingkungan dalam Platform Partai Lokal**

Hasil wawancara dan analisis dokumen menunjukkan bahwa sebagian besar partai politik lokal belum menjadikan isu lingkungan sebagai bagian utama dalam agenda atau platform politik mereka. Dalam dokumen visi dan misi partai, isu-isu lingkungan hanya disebut secara umum dan tidak dijabarkan ke dalam program nyata. Sebagian besar perhatian partai masih tertuju pada isu-isu kesejahteraan ekonomi, infrastruktur, dan pelayanan dasar. Sebagaimana dikemukakan oleh informan dari salah satu partai lokal di wilayah pesisir, “kami lebih banyak fokus pada kebutuhan dasar masyarakat, soal lingkungan biasanya kami serahkan ke pemerintah daerah”.

Temuan ini konsisten dengan studi Wulandari dan Satria (2022) yang menunjukkan bahwa isu lingkungan masih dianggap sebagai isu “sekunder” dalam politik lokal, khususnya di wilayah yang belum terdampak langsung oleh bencana ekologis. Hal ini menunjukkan bahwa urgensi ekologis belum sepenuhnya disadari oleh aktor-aktor politik lokal sebagai bagian dari strategi politik elektoral.

#### **2. Peran Partai Lokal dalam Legislasi dan Pengawasan Kebijakan Lingkungan**

Walaupun minim dalam agenda internal, beberapa partai lokal yang memiliki perwakilan di DPRD terlibat dalam proses legislasi dan pengawasan kebijakan lingkungan, meskipun keterlibatannya masih terbatas. Di salah satu lokasi penelitian, anggota legislatif dari partai lokal terlibat dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pengelolaan sampah, namun lebih bersifat reaktif daripada proaktif. Keterlibatan tersebut didorong oleh tekanan masyarakat sipil dan isu lingkungan yang menjadi perhatian media lokal.

Siregar dan Hamzah (2024) menyebut bahwa partisipasi politik dalam isu lingkungan cenderung bersifat responsif, bukan inisiatif. Hal ini memperkuat

temuan bahwa partai lokal belum membangun kapasitas kelembagaan dalam merumuskan agenda hijau secara sistematis.

### **3. Hambatan Struktural dan Kultural**

Penelitian ini juga menemukan beberapa hambatan struktural dan kultural yang menghambat partai lokal berperan dalam tata kelola lingkungan. Secara struktural, keterbatasan sumber daya manusia dan finansial menjadi kendala utama. Partai lokal di daerah umumnya tidak memiliki tim ahli kebijakan atau staf khusus yang fokus pada isu lingkungan. Secara kultural, adanya anggapan bahwa isu lingkungan adalah tanggung jawab teknis pemerintah (misalnya dinas lingkungan hidup) membuat partai enggan melakukan investasi politik dalam isu ini.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Nugroho dan Hartini (2022) yang menunjukkan bahwa ketimpangan kapasitas kelembagaan menjadi penyebab lemahnya partisipasi politik dalam tata kelola lingkungan. Selain itu, budaya politik lokal yang masih berorientasi patron-klien juga menghambat tumbuhnya kesadaran ekologis dalam struktur partai.

### **4. Potensi dan Peluang Partai Lokal dalam Green Governance**

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya peluang besar bagi partai lokal untuk berperan aktif dalam tata kelola lingkungan. Misalnya, partai yang memiliki basis massa petani dan nelayan menunjukkan ketertarikan terhadap isu-isu yang berkaitan dengan keberlanjutan sumber daya alam lokal. Partai-partai ini memiliki potensi untuk memperjuangkan kebijakan adaptif seperti perlindungan kawasan tangkapan ikan atau tata guna lahan yang berkelanjutan.

Ramadhani dan Yusuf (2023) menyatakan bahwa keterlibatan politik lokal sangat penting untuk menjembatani kepentingan komunitas dengan kebijakan lingkungan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas partai lokal dan pengarusutamaan isu lingkungan dalam pendidikan politik menjadi penting sebagai strategi jangka panjang.

## **D. Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran partai politik lokal dalam tata kelola lingkungan masih tergolong lemah dan belum terintegrasi secara strategis dalam platform maupun agenda politik mereka. Minimnya perhatian terhadap isu lingkungan tercermin dari absennya program-program hijau dalam dokumen partai dan keterlibatan yang cenderung reaktif dalam proses legislasi. Hambatan struktural seperti kurangnya sumber daya dan ketiadaan staf ahli kebijakan lingkungan, serta

hambatan kultural seperti dominasi logika politik jangka pendek, menjadi faktor utama yang membatasi kontribusi partai lokal dalam green governance.

Namun demikian, potensi penguatan tetap terbuka, terutama di daerah yang memiliki komunitas rentan terhadap dampak lingkungan. Partai lokal yang dekat dengan basis konstituen seperti petani, nelayan, dan masyarakat adat memiliki peluang besar untuk menjadi penggerak utama dalam kebijakan lingkungan berbasis keadilan ekologis. Dengan dukungan peningkatan kapasitas kelembagaan dan pendidikan politik yang berfokus pada keberlanjutan, partai lokal dapat berperan signifikan dalam mendorong tata kelola lingkungan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

## **E. Saran**

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar partai politik lokal mulai mengintegrasikan isu-isu lingkungan secara lebih strategis ke dalam agenda dan platform politik mereka. Upaya ini dapat dilakukan melalui penyusunan program kerja yang berbasis pada kebutuhan ekologis masyarakat lokal, serta pelibatan tenaga ahli atau mitra strategis dalam bidang lingkungan. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat mendorong keterlibatan partai lokal dalam proses perumusan dan pengawasan kebijakan lingkungan melalui forum-forum formal seperti musrenbang dan sidang legislatif terbuka. Selain itu, organisasi masyarakat sipil perlu memperkuat peran advokasi dan pendidikan politik kepada partai lokal, guna meningkatkan kesadaran ekologis serta mendorong perubahan budaya politik yang lebih pro-lingkungan. Bagi kalangan akademisi dan peneliti, diperlukan kajian lanjutan yang lebih komparatif antar wilayah atau antar partai guna mengidentifikasi model partisipasi politik lokal yang berhasil dalam mendorong tata kelola lingkungan yang berkelanjutan. Dengan kolaborasi lintas sektor dan penguatan kapasitas institusional, partai lokal memiliki peluang besar untuk menjadi motor perubahan dalam mewujudkan keadilan ekologis di tingkat daerah.

## E. Referensi

- Bäck, H., Heinelt, H., & Magnier, A. (Eds.). (2006). *The European Mayor: Political Leaders in the Changing Context of Local Democracy*. Urban and Regional Research International.
- Global Greens. (2023). *Local Green Parties and Environmental Governance*. <https://www.globalgreens.org>
- ICLEI – Local Governments for Sustainability. (2020). *The Role of Local Governments in Driving Sustainability*.
- Ramadhani, T., & Yusuf, H. (2023). *Peran Pemerintah Daerah dalam Adaptasi Perubahan Iklim: Studi di Kawasan Pesisir*. Jurnal Politik Lingkungan, 12(1), 45–59.
- Siregar, A., & Hamzah, L. (2024). *Partisipasi Politik dalam Kebijakan Hijau: Studi Kasus Partai Lokal di Indonesia Timur*. Jurnal Demokrasi dan Kebijakan Publik, 15(2), 88–105.
- European Green Party. (2022). *Local Green Politics: Strategies for Sustainable Cities*. <https://europeangreens.eu>
- Prasetyo, R. (2021). *Dilema Pembangunan dan Perlindungan Lingkungan dalam Pemerintahan Daerah*. Jurnal Otonomi Daerah, 9(3), 111–125.
- Nugroho, Y., & Hartini, D. (2022). *Kapasitas Kelembagaan Lokal dalam Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan*. Jurnal Tata Kelola dan Kebijakan Publik, 10(4), 201–217.
- Wulandari, F. (2023). *Simbolisme Politik dalam Legislasi Lingkungan di Pemerintah Daerah*. Jurnal Sosial Politik, 14(1), 33–48.
- Wulandari, F., & Satria, D. (2022). *Ketimpangan Agenda Lingkungan dalam Politik Lokal: Studi pada Pilkada 2020*. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, 17(1), 34–50.